

Judul : Pembebasan Warga Papua, Senayan Percaya TNI dan Polri
Tanggal : Rabu, 15 November 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pembebasan Warga Papua, Senayan Percaya TNI & Polri

WAKIL Ketua DPR Agus Hermanto meminta masyarakat mempercayakan sepenuhnya pembebasan 1.300 warga Papua yang disandera kelompok bersenjata di Timika kepada aparat TNI-Polri. Terlebih, TNI dan Polri sudah melakukan langkah-langkah persuasif untuk membebaskan para sandera.

“Aparat keamanan TNI-Polri sudah melakukan cara-cara persuasif. Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat TNI-Polri,” kata Agus di Gedung DPR, kemarin.

Agus pun berharap, kasus penyanderaan ini segera tuntas tanpa memakan korban jiwa dari warga. Dia pun meminta, ke depannya, TNI-Polri lebih kuat dalam menjaga keamanan di Papua. Tujuannya, agar kasus serupa tak terulang. “TNI dan Polri harus lebih benar-benar menjaga keamanan wilayah dan keselamatan warga negara, terkhusus daerah perbatasan,” tambah dia.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon bicara lebih keras. Dia menyebut, kelompok bersenjata yang menyandera 1.300 warga Papua itu layak disebut sebagai teroris. “Mereka lebih tepat disebut kelompok teroris daripada kelompok kriminal,” ucap pentolan Partai Gerindra ini, kemarin.

Menurut Fadli, penyanderaan tersebut tak hanya melanggar hukum, melainkan juga mengancam hidup ribuan warga sipil di Papua. Makanya, para pelaku penya-

deraan harus segera ditindak. Hal itu juga penting agar sandera tidak kelaparan.

“Tentunya, kondisi warga yang terisolasi sudah mulai kekurangan makanan. Kondisi fisik mereka juga pasti menurun,” tegas dia.

Namun begitu, dia berharap tidak ada kontak senjata dalam upaya pembebasan santra itu. Dia ingin TNI-Polri lebih mengutamakan pendekatan persuasif dan preventif.

Sebagai ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, Fadli mengaku telah mengamati gerak-gerik kelompok itu yang banyak disebut berasal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam kurun waktu tiga tahun, gerakan mereka semakin nyaring. Bukan hanya melakukan gerakan, mereka juga terus menjalin hubungan dengan pihak luar.

“Mereka aktif mencari basis dukungan di forum internasional. Contohnya, seperti di Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Island Forum (PIF), bahkan di forum dekolonisasi di the United Nations (UN),” katanya.

Padahal, lanjut dia, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk meredam gerakan ini hingga lahirnya kebijakan Otsus di Papua. Otsus itu diberikan agar permasalahan di Papua cepat teratasi. “DPR ingin implementasi Otsus dapat memberikan dampak strategis bagi penyelesaian permasalahan politik dan keamanan di Papua.” ■ KAL